



Bahas RAL Bersama BPK ✓

TERKAIT status PT Riau Airline (RAL) yang sampai saat ini masih tercatat sebagai BUMD Riau, Komisi DPRD Riau akan segera berkonsultasi kepada BPK, dan BPKP.

Konsultasi ini guna mengetahui status perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Sejauh ini keberadaan RAL tidak jelas. Fisik pesawat, keberadaan kantornya tidak diketahui.

Ketua Komisi D, Aherson menegaskan akan mempelajari putusan Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permintaan kasasi atas status pailit perusahaan tersebut.

"Ini harus kita dalami. Putusan MA patut ditindaklanjuti. Kita akan

konsultasi BPK dan BPKP," ujarnya, Kamis (6/11).

Politisi Demokrat Riau ini menegaskan akan memanggil Direktur RAL yang tersisa masih menjabat saat ini. Pemanggilan dilakukan guna mengetahui tindak lanjut atas dikabulkannya putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

"Kita akan panggil Dir RAL, walaupun sudah ilang timbul. Kita klarifikasi bagaimana soal putusan itu," jelasnya.

Keberadaan aset maskapai ini juga akan ditelusuri. Saat ini menurutnya, tidak diketahui jumlah pasti total aset yang dimiliki perusahaan. Kondisi fisik pesawat juga

menjadi pertanyaannya. Hingga saat ini pesawat RAL dikabarkan sudah menjadi bangkai yang tidak terurus di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Pada Rabu (5/11) lalu, perwakilan karyawan RAL mendatangi Komisi D. Mereka mengantarkan berkas putusan MA. Mantan Karyawan ini meminta agar hal mereka segera dilunasi oleh perusahaan.

Terdapat sekitar 30 an orang karyawan yang di PHK, tetapi belum menerima hak-hak mereka. Putusan MA menurut mereka telah menyatakan perusahaan untuk segera melunasi kewajiban mereka. (iam)